

**Judul** : Ada KUHP-KUHAP baru, Komisi III DPR yakin Polri akan semakin reformis  
**Tanggal** : Selasa, 10 Februari 2026  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 9

## Ada KUHP-KUHAP Baru

# Komisi III DPR Yakin Polri Akan Semakin Reformis

Senayan berkeyakinan pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru akan menjadi katalisator utama dalam mempercepat reformasi Polri.

KETUA Komisi III DPR Habiburrahman mengatakan dalam waktu singkat masyarakat sudah mulai merasakan langsung dampak baik dari KUHP dan KUHAP baru tersebut. "KUHP dan KUHAP baru banyak mengandung nilai-nilai reformis yang sudah dan akan terus diimplementasikan oleh Polri dan para penegak hukum lainnya," ujar, Minggu (8/2/2026).

Dia mencontohkan beberapa kasus nyata yang berhasil diselesaikan dengan pendekatan reformis. Antara lain, penghentian perkara guru di Jambi yang mencukur rambut muridnya dan kasus Hoge Minaya dalam kasus penjabretan di Sleman, Yogyakarta. Regulasi baru ini memaksa institusi penegak hukum untuk mengalihkan orientasi dari sekadar kepastian hukum menuju keadilan yang substantif.

Nilai-nilai reformasi tersebut ada di Pasal 36 KUHP baru. Inti-

nya, tiada pidana tanpa kesengajaan atau asas dualistis. "Sekarang orang yang melakukan pidana harus dilihat konteks dan mensyaratkan untuk dijatuhkan hukuman," tegas politikus Gerindra ini.

Selain itu, ia menyoroti Pasal 100 KUHAP baru yang mengubah syarat penahanan dari subjektif menjadi objektif. Sehingga, penyidik tidak bisa lagi menahan seseorang tanpa bukti adanya upaya nyata untuk melarikan diri atau menghilangkan alat bukti.

"Kehadiran advokat dalam mendampingi saksi dan kewajiban penggunaan kamera pengawas saat pemeriksaan juga menjadi jaminan transparansi," tandas legislator asal daerah pemilihan (dapil) Jakarta ini.

Dengan prasyarat itu semua, lanjutnya, reformasi Polri akan terus berjalan cepat. Dan ini juga memberikan ruang kepada warga negara untuk melakukan pengawasan melalui advokat



Habiburrahman

terhadap kinerja Polri.

Dia menambahkan penguatan sistem ini membuat pembentukan lembaga pengawas baru tidak lagi mendesak dilakukan. Karena dengan ratusan ribu advokat dan partisipasi aktif masyarakat, ditambah penguatan internal melalui Profesi dan Pengamanan (Propam) dan Pengawasan Penyidikan (Wasidik), optimisme terhadap wajah baru penegakan hukum nasional kian nyata.

Untuk itu, semua pihak tidak perlu pusing dan bingung membentuk lembaga pengawas baru. "Kita punya ratusan juta orang

warga negara dan lebih 100 ribu advokat yang akan melakukan pengawasan demi tegaknya hukum dan demi berjalan cepatnya reformasi Polri," kata dia.

Anggota Komisi III DPR I Wayan Sudirta menambahkan, keberhasilan akselerasi transformasi dan reformasi Polri sangat bergantung pada efektivitas fungsi pengawasan. Konsep reformasi yang telah disusun oleh Mabes Polri tidak akan mencapai hasil maksimal jika tidak disertai dengan implementasi pengawasan yang ketat di lapangan.

Dia menilai, konsep transformasi Polri sudah bagus, karena terdiri dari 35 halaman. Namun yang menarik, dari jumlah tersebut hanya tiga halaman yang membahas mengenai pengawasan. "Padahal bagian inilah yang paling banyak dipersoalkan oleh para ahli dan aktivis," ungkapnya.

Sudirta menyebut, ada tiga komponen kunci di internal kepolisian yang harus diperkuat, yaitu Inspektorat, Propam, dan Wasidik. Penempatan personel terbaik pada tiga fungsi tersebut merupakan syarat mutlak agar

reformasi kultur sumber daya manusia (SDM) dapat berjalan sesuai rencana. "Jangan sampai jabatan pengawasan hanya menjadi formalitas," jelasnya.

Jika ada jabatan tapi tidak berfungsi mengawasi atau justru melindungi kesalahan, dia mengingatkan jangan heran jika masyarakat terus menuntut reformasi karena pengawasan internalnya mandek.

Selain itu, ia mengusulkan penguatan kewenangan Komisi Kepolisian Nasional (Kopolnas) agar memiliki fungsi penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran administratif maupun etika. Hal ini diperlukan guna memberikan efek jera serta memastikan Polri bergerak ke arah yang lebih ideal.

Sudirta meminta antara Propam dan Kopolnas itu saling melengkapi. Propam bekerja secara internal, sementara Kopolnas secara eksternal. Namun saat ini peran eksternal tersebut dirasa masih kurang kuat. "Jadi perlu penguatan kewenangan jika kita ingin penegakan disiplin Polri tuntas," pungkask politikus PDIP ini. ■ 111